

III

Kearifan Lokal dan UMKM Kreatif: Kunci Revitalisasi Ekonomi Inklusif di Era Digital

Misbahul Arifin¹, Durrotul Masruroh², Chusnul Muali³

Universitas Nurul Jadid, Indonesia

¹ arifinmisbahul324@gmail.com, ² durrotulmasruroh6@gmail.com, ³ chusnulmuali@unuja.ac.id

Article history

Submitted: 2025/07/30; Revised: 2025/08/01; Accepted: 2025/08/07

Abstract

This research delves into the application of the Community-Based Development Model (CBDM) to empower MSMEs rooted in local wisdom within Probolinggo Regency, contributing to participatory and sustainable community economic development. The core focus is to understand how community engagement, leveraging local potential, and digitalization drive collective economic independence. Employing a qualitative approach with a case study method, data was gathered via in-depth interviews, observation, documentation, and thematic analysis. Findings highlight five key stages in CBDM implementation: identifying local potential, community involvement, MSME capacity building, executing culture-based programs, and evaluating economic independence. This implementation successfully boosted MSME turnover by 57%, spurred citizen participation in village economic forums, and independently strengthened digital marketing capabilities. These results demonstrate that development rooted in local participation and culture not only enhances the economy but also reinforces community social cohesion, offering a replicable development model for similar regions.

Keywords

Community Empowerment; Local MSMEs; Participatory Development.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang berlangsung secara masif telah menjelma menjadi akselerator utama dalam membentuk ulang struktur sosial-ekonomi masyarakat, termasuk dalam ranah ekonomi lokal (Acemoglu 2025; Frankema 2025). Fenomena ini tidak hanya menciptakan disrupsi sistemik, tetapi juga memaksa entitas ekonomi lokal untuk menempuh langkah-langkah adaptif yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kemampuan bertahan dan meningkatkan daya saing tidak lagi dapat ditopang oleh pendekatan konvensional yang berorientasi pada efisiensi teknokratis semata (Čajka and Novotný 2022). Sebaliknya, diperlukan paradigma baru yang lebih inklusif dan berakar pada pendekatan partisipatoris, di

mana nilai-nilai kultural serta modal sosial komunitas lokal menjadi sumber daya integral dalam proses revitalisasi ekonomi. Integrasi antara inovasi digital dan kearifan lokal inilah yang menjadi prasyarat mutlak dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang resilien dan transformatif di tengah tekanan globalisasi.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi yang berkeadilan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis kreativitas dan kearifan lokal memiliki posisi strategis sebagai katalis transformasi sosial-ekonomi (Cantoni and Yuchtman 2025; Cirone and Pepinsky 2022) Lebih dari sekadar entitas ekonomi produktif, UMKM kreatif merepresentasikan konfigurasi ekosistem sosial dan budaya yang mengekspresikan identitas, nilai-nilai, serta makna kolektif dari suatu komunitas. Keberadaannya menjadi medium artikulatif antara dinamika ekonomi dan ekspresi kultural masyarakat lokal. Dengan merujuk pada kerangka teori inclusive growth Nchake and Shuaibu (2022) UMKM berbasis kearifan lokal diposisikan sebagai instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan output, tetapi juga menjamin distribusi hasil pembangunan secara adil, merata, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menegaskan pentingnya integrasi dimensi ekonomi dan sosial demi menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan komunitas (Ofori and Asongu 2021).

Kendati memiliki peran strategis, realitas empiris menunjukkan bahwa UMKM kreatif masih dihadapkan pada tantangan yang bersifat multidimensional, khususnya terkait akses terhadap sumber daya digital yang kini menjadi prasyarat esensial dalam ekosistem ekonomi digital. Ketimpangan akses terhadap infrastruktur teknologi, rendahnya tingkat literasi digital, serta minimnya dukungan terhadap pengembangan ekosistem pemasaran digital merupakan hambatan struktural yang secara laten membatasi kapasitas adaptif pelaku UMKM, terutama di kawasan-kawasan marginal atau wilayah perifer. Khususnya di kabupaten probolinggo. Padahal, bila potensi ekonomi lokal yang terkandung dalam UMKM tersebut mampu terintegrasi secara sinergis dengan teknologi digital melalui pemanfaatan platform e-commerce, sistem pembayaran elektronik, hingga strategi pemasaran digital berbasis media sosial maka transformasinya dapat menjadi katalis percepatan menuju pembangunan ekonomi lokal yang bersifat inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Fenomena ini merefleksikan bahwa upaya revitalisasi ekonomi lokal tidak dapat semata-mata bergantung pada intervensi kebijakan makro yang bersifat top-

down. Sebaliknya, dibutuhkan pendekatan strategis yang mengedepankan model bottom-up, berbasis komunitas, serta berakar pada nilai-nilai lokalitas sebagai fondasi utama. Dalam konteks ini, integrasi yang sinergis antara sejumlah variabel kunci seperti UMKM kreatif, kearifan lokal, digitalisasi ekonomi, dan prinsip inklusivitas merupakan prasyarat fundamental dalam membentuk arsitektur ekonomi lokal yang tangguh, adaptif terhadap dinamika perubahan, serta menjunjung tinggi asas keadilan sosial-ekonomi.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di era digital Satriani et al. (2024) menjelaskan bahwa digitalisasi membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan inklusivitas ekonomi. Namun, proses ini masih menghadapi kendala di tingkat lokal, seperti terbatasnya infrastruktur dan rendahnya literasi digital pelaku UMKM.

Selain itu penelitian Nurmaulidia et al. (2024) juga menekankan bahwa UMKM menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi inklusif di Asia Tenggara. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh adanya ekosistem digital yang mendukung serta kebijakan publik yang berpihak pada UMKM. Tanpa dukungan tersebut, potensi UMKM sulit berkembang secara optimal.

Selanjutnya, Emilia and Dompok (2024) menemukan bahwa UMKM berbasis kearifan lokal memiliki peluang pasar yang besar. Namun, mereka kerap tersisih dalam kebijakan pembangunan yang lebih fokus pada teknologi dan inovasi digital. Hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang lebih inklusif dan kontekstual agar UMKM lokal tidak tertinggal dalam arus transformasi ekonomi digital.

Melihat dari berbagai studi sebelumnya, pembahasan mengenai UMKM kreatif, kearifan lokal, dan digitalisasi masih berdiri sendiri-sendiri dengan ritmenya masing-masing. Belum ditemukan kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan ketiga aspek tersebut ke dalam satu kerangka analisis yang terpadu. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menghadirkan sebuah kebaruan dengan mengeksplorasi keterhubungan antara nilai-nilai kearifan lokal, dinamika UMKM kreatif, dan transformasi digital dalam upaya revitalisasi ekonomi lokal yang inklusif melalui Community-Based Development model.

Dari berbagai paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun suatu kerangka konseptual yang menempatkan UMKM kreatif sebagai agen strategis dalam transformasi ekonomi berbasis komunitas. Melalui integrasi nilai-nilai budaya lokal dan pemanfaatan teknologi digital, penelitian ini berupaya menciptakan pendekatan baru yang tidak

hanya memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan, tetapi juga menumbuhkan identitas sosial yang berakar pada kekayaan lokal berbasis Community-Based Development. Model ini menawarkan pijakan yang kokoh dalam mendorong kemandirian ekonomi, inklusivitas, dan keberlanjutan melalui pola-pola adaptif yang relevan dengan tantangan era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan berbasis komunitas dalam penguatan UMKM lokal di Kabupaten Probolinggo, dengan menekankan pada model Community-Based Development yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Pendekatan penelitian ini menggunakan model inkuiri kontekstual berbasis sosial-kultural sebagaimana dimungkinkan dalam kerangka pemikiran Robert Chambers dan Mohan (2024), yang memosisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus (Myers et al. 2024). Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam dinamika komunitas lokal, termasuk strategi pemberdayaan, kendala struktural, dan nilai-nilai budaya yang menyertainya dalam konteks spesifik Kabupaten Probolinggo. Studi kasus ini bersifat eksploratif terhadap fenomena ekonomi lokal yang tumbuh dari bawah (bottom-up), khususnya di desa-desa seperti Banyuwang, Kraksaan Wetan, dan Sumberlele.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara simultan dan berlapis dengan menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu: 1) observasi partisipatif terhadap aktivitas komunitas dan pelaku UMKM di balai desa, forum rembug warga, dan pelatihan digitalisasi; 2) wawancara mendalam, terdiri dari kepala desa, penggerak UMKM, fasilitator komunitas, pemuda kreatif desa, dan tokoh masyarakat yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan; dan 3) dokumentasi terhadap berbagai arsip lokal seperti laporan BUMDes, proposal pelatihan, materi pelatihan digital marketing, serta publikasi komunitas di media sosial. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena menunjukkan keberhasilan awal penerapan prinsip-prinsip CBDM. Seluruh data dikumpulkan secara triangulatif untuk memastikan kekayaan dan keakuratan informasi yang diperoleh.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Daulay et al. 2021). Data yang dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat secara sistematis, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan sesuai tema besar seperti partisipasi komunitas, transformasi digital UMKM, dan pemberdayaan

ekonomi berbasis lokal. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik agar memudahkan interpretasi secara komprehensif. Proses ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat merepresentasikan dinamika sosial-ekonomi masyarakat secara utuh, tanpa menghilangkan makna kontekstualnya. Dari penyajian ini kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk menjelaskan bagaimana pendekatan CBDM membentuk sistem ekonomi alternatif berbasis budaya komunitas yang lebih tangguh dan inklusif di tengah tantangan global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Community-Based Development Model adalah pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi (Park and Wang 2010; Platteau and Gaspard 2003). Fokus utamanya bukan pada output fisik, melainkan pada pemberdayaan, transformasi sosial, dan penguatan kapasitas lokal. Model ini muncul sebagai respons terhadap pendekatan top-down yang cenderung mengabaikan konteks dan potensi lokal, dengan menekankan partisipasi aktif, gotong royong, dan pengambilan keputusan yang demokratis di tingkat akar rumput (Leach et al. 2025).

Gambar 1. Tahapan Community-Based Development Model



Potential Identification

Identifikasi potensi merupakan proses strategis dalam pembangunan partisipatif yang bertujuan untuk mengenali, memetakan, dan mengkaji berbagai

sumber daya dan kapasitas yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau suatu wilayah tertentu (Achmad 2023). Identifikasi potensi merupakan tahapan krusial dalam pembangunan berbasis komunitas yang tidak hanya mencakup inventarisasi aset fisik dan ekonomi, tetapi juga sumber daya sosial, budaya, ekologis, dan teknologi. Proses ini menjadi fondasi dalam merancang program pemberdayaan yang relevan dan kontekstual. Pendekatan ini bersifat partisipatif, menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam mengenali dan mengembangkan kekuatan lokal, sekaligus mengoreksi pola pembangunan top-down yang sering mengabaikan potensi internal komunitas.

Salah satu langkah penting dalam pendekatan CBDM adalah melakukan pemetaan awal terhadap potensi ekonomi lokal yang berbasis kearifan budaya. Pemetaan ini bukan hanya untuk mencatat aset ekonomi yang ada, tetapi juga untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan (analisis SWOT) guna merancang strategi pembangunan yang sesuai. Di beberapa desa di Probolinggo, seperti Condong, Sukapura, dan Leces, terdapat usaha ekonomi tradisional yang tidak hanya menggerakkan perekonomian lokal, tetapi juga menjaga nilai budaya dan jati diri komunitas. Contohnya antara lain batik bermotif lokal, tape manis dari Kraksaan, kerajinan ukir kayu warisan leluhur, dan seni jaranan yang sarat nilai estetika dan tradisi.

UMKM yang berbasis kearifan lokal memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Secara ekonomi, mereka membantu menambah pendapatan keluarga dan menciptakan lapangan kerja. Secara sosial dan budaya, mereka ikut melestarikan tradisi dan memperkuat hubungan antarwarga. Karena itu, pemetaan potensi UMKM perlu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan tokoh adat, pelaku usaha, perempuan, dan pemuda, agar hasilnya mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Hasil pemetaan ini bisa menjadi dasar untuk menyusun program pemberdayaan ekonomi komunitas. Revitalisasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan atau memperluas pasar, tetapi juga mendorong perubahan sosial agar masyarakat menjadi lebih mandiri dan tangguh. Bentuk intervensinya bisa berupa pelatihan usaha, promosi digital, akses permodalan, dan dukungan kebijakan yang menguntungkan UMKM lokal.

Tabel 1. Jenis UMKM Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Probolinggo

No	Jenis Usaha	Bahan Utama	Nilai Budaya Lokal
1	Batik Probolinggo	Ganesha Pewarna alam, kain katun	Motif khas daerah dan filosofi lokal
2	Tape Manis Kraksaan	Singkong lokal	Resep turun-temurun keluarga

3	Ukiran Kayu Leces	Kayu jati, mahoni	Warisan seni pertukangan
4	Jaranan Khas Bromo	Seni tari, musik gamelan	Tradisi hiburan rakyat dan spiritual

Transformasi digital kini menjadi kebutuhan bagi UMKM di Kabupaten Probolinggo. Namun, banyak pelaku usaha di pedesaan yang masih belum akrab dengan teknologi digital, baik dalam hal penggunaan perangkat maupun pembuatan konten. Hasil studi di Kecamatan Kraksaan dan Tongas menunjukkan bahwa mayoritas UMKM masih mengandalkan cara pemasaran tradisional, seperti di pasar mingguan atau bazar desa. Penggunaan media sosial, marketplace, dan aplikasi desain produk masih rendah karena kurangnya pelatihan dan terbatasnya akses internet. Padahal, data BPS Jawa Timur (2022) mencatat bahwa UMKM yang sudah menerapkan digitalisasi bisa meningkatkan pendapatan hingga 35%. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendidikan digital yang berkelanjutan dan sesuai dengan budaya serta kondisi sosial masyarakat setempat.

Tabel 2. Tingkat Kesiapan Digital Pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo

Aspek Kesiapan Digital	Persentase (%)
Memiliki perangkat smartphone	79%
Terhubung dengan internet stabil	41%
Memiliki akun media sosial	47%
Pernah mengikuti pelatihan digital	15%
Aktif memasarkan produk secara daring	10%

Keberhasilan digitalisasi UMKM di Probolinggo tidak bisa dicapai hanya dengan pelatihan sekali saja. Dibutuhkan pendampingan yang terus-menerus dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Banyak pelaku UMKM masih kesulitan menggunakan aplikasi seperti Canva atau platform penjualan online karena belum terbiasa. Jaringan internet yang lemah dan pemahaman teknologi yang rendah juga menjadi kendala. Karena itu, pelatihan sebaiknya memakai bahasa lokal, metode praktik langsung, dan menyesuaikan cara berpikir warga.

Masalah lain yang dihadapi adalah sulitnya mengurus izin usaha dan akses modal. Di daerah seperti Lumbang dan Tiris, banyak UMKM belum memiliki NIB, sehingga tidak bisa mendapat bantuan pemerintah atau pinjaman bank. Hanya sekitar 21% UMKM yang sudah punya legalitas. Ini terjadi karena proses birokrasi yang rumit, kurangnya informasi, dan rendahnya pemahaman hukum. Solusinya, prosedur perizinan perlu dipermudah dan dibentuk tim pendamping desa untuk membantu UMKM masuk ke sistem formal.

Permodalan juga menjadi tantangan besar. Banyak pelaku usaha masih mengandalkan dana pribadi atau pinjaman keluarga karena merasa syarat pinjaman bank terlalu berat. Sementara itu, koperasi desa belum optimal mendukung UMKM lokal. Alternatif solusi bisa berupa penguatan koperasi digital, dana bergulir komunitas, atau platform urun dana (crowdfunding) lokal. Pendekatan Community-Based Development Model (CBDM) penting untuk mengenali potensi dan hambatan UMKM. Ketika masyarakat sadar akan nilai ekonomi dan budaya dari produk lokal, serta memahami tantangan yang dihadapi, maka semangat perubahan akan tumbuh. Di Probolinggo, sudah mulai muncul forum warga dan pelatihan berbasis komunitas yang mendorong penguatan ekonomi lokal dengan basis budaya dan solidaritas sosial.

Active Community Participation

Partisipasi aktif masyarakat merupakan fondasi konseptual sekaligus praksis strategis dalam mewujudkan pembangunan sosial yang berkelanjutan dan inklusif (Mustakim and Hos 2025). Dalam konteks Kabupaten Probolinggo, partisipasi ini merefleksikan keterlibatan warga secara intensional, sukarela, dan berkelanjutan dalam keseluruhan spektrum pembangunan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Keterlibatan tersebut tidak hanya bersifat formalitas dalam ruang-ruang deliberatif seperti musyawarah desa, melainkan menjelma menjadi kontribusi substansial dalam bentuk penyampaian gagasan inovatif, pengabdian tenaga kerja, pemanfaatan sumber daya lokal, serta penanaman tanggung jawab kolektif atas setiap kebijakan yang berdampak terhadap kesejahteraan publik.

Secara teoritis, Cohen dan Uphoff (1980) menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat memiliki makna penting karena berperan sebagai alat kontrol sosial (Muljono et al. 2022). Melalui partisipasi, masyarakat dapat ikut menentukan arah pembangunan dan memastikan manfaatnya dibagikan secara adil. Dengan demikian, partisipasi bukan hanya kegiatan formal, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap hak dan otonomi masyarakat dalam memengaruhi pembangunan secara sadar dan kritis. Sejalan dengan itu, Oakley dan Marsden (1984) menyatakan bahwa partisipasi aktif mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan berkeadilan sosial (Riantini and Situmeang 2022).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan sekadar mengikuti prosedur formal. Ia adalah proses yang mencerminkan kondisi sosial dan politik di masyarakat, termasuk soal kekuasaan, akses informasi, dan kemampuan warga untuk menyuarakan kepentingan secara bersama. Partisipasi yang sejati bukan

hanya alat teknis, tetapi juga ruang dialog yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, bukan hanya sebagai penerima. Kualitas partisipasi sangat bergantung pada sejauh mana proses pengambilan keputusan berlangsung secara demokratis dan terbuka di tingkat lokal.

Di Kabupaten Probolinggo, partisipasi masyarakat berkembang positif berkat kearifan lokal seperti gotong royong, rembug desa, dan nilai kolektif dari budaya Madura-Jawa. Nilai-nilai ini menumbuhkan kebiasaan partisipatif yang memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan keberhasilan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pembangunan berbasis partisipasi, kearifan lokal ini bukan hanya warisan budaya, tetapi juga modal penting untuk memperkuat daya juang komunitas lokal.

Partisipasi aktif masyarakat di Kabupaten Probolinggo telah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap praktik pembangunan. Studi Qomariah et al. (2025) mencatat di Kecamatan Krucil, partisipasi warga dalam program ketahanan pangan organik berbasis kelompok tani swadaya melibatkan mereka secara langsung dalam perencanaan kebutuhan pupuk, pengawasan distribusi benih, hingga evaluasi hasil panen. Ini menandakan bentuk partisipasi substantif, di mana warga memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan berbasis pengetahuan lokal. Sementara itu, dalam sektor ekonomi kreatif, masyarakat di Desa Banyuanyar dan Kraksaan Wetan berpartisipasi sejak tahap perencanaan hingga monitoring program pelatihan batik dan produksi tape manis. Evaluasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Probolinggo (2023) menunjukkan peningkatan omzet sebesar 32% pada pelaku usaha yang mengikuti program pelatihan partisipatif, memperlihatkan korelasi antara keterlibatan warga dan output ekonomi yang terukur.

Wawancara dengan Kepala Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, menegaskan bahwa partisipasi warga sudah menjadi bagian penting dalam pembangunan desa. Ia menyebutkan bahwa musyawarah desa selalu dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua kelompok, termasuk perempuan, pemuda, dan tokoh adat. Hal ini selalu melibatkan semua unsur masyarakat. Pembangunan tidak akan berhasil tanpa dukungan warga.

Contoh nyatanya adalah pembangunan balai pelatihan batik yang merupakan usulan langsung dari warga. Awalnya hanya untuk pelatihan membatik, balai ini kemudian dikembangkan menjadi tempat pelatihan pemasaran digital produk lokal. Ini menunjukkan bahwa masyarakat terlibat secara nyata, bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi benar-benar menentukan arah program.

Partisipasi seperti ini mencerminkan keterlibatan yang lebih bermakna, di mana masyarakat bersama pemerintah desa merancang dan menjalankan program pembangunan secara kolaboratif. Namun demikian, partisipasi belum sepenuhnya merata secara spasial dan sosial. Al Ahsani (2024) menemukan bahwa di wilayah seperti Kecamatan Tiris dan Lumbang, proses musyawarah masih didominasi oleh elite lokal, yang berimplikasi pada terpinggirkannya suara kelompok marginal seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Fenomena ini menandakan bahwa masih terdapat ketimpangan struktural dalam akses terhadap ruang deliberatif. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme fasilitasi partisipasi yang lebih representatif dan inklusif, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa agar dapat menjamin keadilan distribusi suara dalam setiap proses perencanaan pembangunan.

Aktor-aktor penting seperti pendamping desa, fasilitator UMKM, dan tokoh masyarakat progresif berperan besar dalam menciptakan ruang partisipasi yang terbuka dan bermakna. Menurut studi Bappenas (2020), keberhasilan pembangunan partisipatif sangat dipengaruhi oleh kualitas dialog antar pihak dan kemampuan desa membangun kerja sama yang baik. Hal ini terlihat di Desa Sukodono, Kecamatan Pajajaran, yang membentuk Forum Ekonomi Kreatif Desa sebagai wadah musyawarah antara pelaku usaha, pemuda, dan pemerintah desa. Forum ini berhasil menyusun strategi branding dan pemasaran digital, yang meningkatkan permintaan pasar produk lokal hingga 40% dalam satu tahun.

Partisipasi masyarakat di Kabupaten Probolinggo telah terbukti menjadi alat demokrasi yang mendorong perubahan sosial, pembangunan yang inklusif, dan ketahanan komunitas. Untuk memperkuat keberhasilan ini ke depan, dibutuhkan strategi yang lebih sistematis seperti memperluas akses informasi publik, meningkatkan literasi warga, dan menyederhanakan mekanisme pengawasan sosial. Partisipasi harus dipandang sebagai proses sosial dan politik yang hidup, yang bukan hanya mendukung tata kelola yang baik, tetapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai lokal untuk menghadapi tantangan pembangunan masa kini secara berkelanjutan.

Empowerment

Pemberdayaan adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kekuatan, dan kemandirian individu maupun kelompok dalam mengambil keputusan serta mengontrol sumber daya yang memengaruhi kehidupan mereka. Secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Inggris *empower* yang berarti memberikan kekuatan atau wewenang (Putra et al. 2025). Dalam konteks

pembangunan, empowerment menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Pemberdayaan juga mencakup peningkatan rasa percaya diri, akses terhadap sumber daya, dan pengembangan kemampuan agar masyarakat dapat bertindak secara mandiri serta lepas dari ketergantungan terhadap pihak luar.

Secara terminologis, pemberdayaan didefinisikan oleh World Bank sebagai perluasan kebebasan untuk memilih dan bertindak bagi masyarakat, khususnya yang berada dalam kondisi marginal atau miskin. Zimmerman (1995) menambahkan bahwa empowerment merupakan proses di mana individu memperoleh kontrol atas keputusan dan tindakan yang memengaruhi hidup mereka (Hibbs 2022). Dalam praktiknya, pemberdayaan dapat diwujudkan melalui pelatihan keterampilan, penguatan kelembagaan lokal, akses terhadap pembiayaan usaha, dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian, empowerment tidak hanya menciptakan perubahan struktural, tetapi juga mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan, adil, dan berbasis pada potensi lokal masyarakat itu sendiri.

Temuan di Kabupaten Probolinggo menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya di sektor UMKM, mengalami perkembangan positif. Salah satu contohnya adalah pengembangan UMKM batik di Desa Banyuanyar dan Sumberlele. Data Dinas Koperasi dan UMKM Probolinggo (2023) mencatat ada lebih dari 45 usaha batik aktif yang tergabung dalam Batik Ganesha Probolinggo. Menariknya, sekitar 72% dikelola oleh perempuan yang sebelumnya belum memiliki akses pelatihan atau strategi pemasaran digital. Pelatihan membatik dan penguatan merek lokal terbukti berdampak positif secara ekonomi. Setelah mengikuti pelatihan digital marketing dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, pendapatan pelaku UMKM batik naik rata-rata 36% dalam satu tahun. Produk batik dengan motif lokal seperti bunga krisan dan mangga madu kini sudah dipasarkan secara online melalui platform seperti Shopee dan Tokopedia.

Kepala Desa Sumberlele, mengatakan bahwa Batik bukan sekadar sandang bagi masyarakat kami, tetapi menjadi simbol identitas budaya. Saat ibu-ibu rumah tangga mampu menjual produk batik melalui ponsel, itu menandai bukan hanya perubahan penghasilan, tapi juga cara pandang terhadap masa depan.

Selain industri batik, sektor pangan lokal juga mengalami dinamika pemberdayaan yang signifikan, seperti pada produk tape manis khas Kraksaan dan keripik pisang dari Gending. Berdasarkan laporan Bappeda Kabupaten Probolinggo (2024), terdapat lebih dari 130 unit usaha rumah tangga yang bergerak di bidang

olahan pangan dan tersebar di enam kecamatan. Sebagian besar dikelola oleh keluarga petani dengan skala mikro, namun memiliki prospek pasar yang luas karena cita rasa khas serta penggunaan bahan lokal. Tape manis, misalnya, yang dibuat melalui metode fermentasi warisan leluhur, kini dikembangkan dalam bentuk kemasan modern melalui program “UMKM Naik Kelas” yang mendapat dukungan pendanaan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh AINI (2024) di Kecamatan Krucil menunjukkan bahwa pelatihan dalam bidang pengemasan produk dan sertifikasi halal dari MUI lokal sangat berperan dalam memperluas akses pasar. Dalam ajang Festival UMKM Jawa Timur 2023, dua produk unggulan dari Probolinggo yakni keripik tempe Sumber dan tape manis Kraksaan berhasil meraih penghargaan sebagai produk pangan lokal inovatif.

Namun demikian, terdapat sejumlah hambatan struktural yang masih membatasi optimalisasi pemberdayaan UMKM. Hasil survei dari tim peneliti Universitas Panca Marga (2023) mengungkap bahwa sekitar 61% pelaku UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan hanya 27% yang pernah mengikuti pelatihan terkait literasi keuangan digital atau akuntansi dasar. Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital, khususnya akses internet yang lambat di wilayah perbukitan seperti Kecamatan Tiris dan Lumbang, menjadi kendala nyata dalam mendorong transformasi digital UMKM secara merata.

Tabel 3. Tantangan dan Strategi Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Probolinggo

Aspek Tantangan	Kondisi Terkini	Strategi Pemberdayaan
Akses legalitas usaha (NIB)	Hanya 39% UMKM memiliki NIB	Pembentukan layanan NIB keliling desa
Literasi digital pelaku UMKM	27% memahami aplikasi pemasaran digital	Pelatihan intensif + mentoring lapangan
Ketersediaan jaringan internet	Lemah di daerah pegunungan (Tiris, Lumbang)	Penyediaan WiFi desa & digital corner BUMDes
Ketimpangan partisipasi gender	Perempuan terbatas dalam forum perencanaan	Pembentukan forum UMKM perempuan

Dalam konteks teori pembangunan, hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan tidak hanya memerlukan pelatihan teknis, tetapi juga perlu didukung dengan reformasi struktural, kelembagaan yang responsif, dan penyediaan sarana pendukung. Sejalan dengan pendapat Sen (1999) dalam *Development as Freedom*, pembangunan yang sejati adalah proses pembebasan manusia dari belenggu

keterbatasan baik struktural maupun sosial sehingga mereka mampu menentukan dan memperjuangkan nasibnya sendiri (Yahya et al. 2025).

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Probolinggo telah menunjukkan hasil nyata melalui sektor-sektor strategis seperti batik, kuliner lokal, dan kerajinan. Namun untuk mendorong transisi dari ketergantungan menuju kemandirian, dibutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih holistik: berbasis komunitas, didukung oleh kebijakan inklusif, serta memperhatikan keunikan budaya dan sosial setempat. Pemberdayaan bukan hanya proses ekonomi, tetapi juga proses peradaban yang menumbuhkan harapan dan harga diri masyarakat dari akar rumput.

Implementation

Tahapan implementasi dalam kerangka Community-Based Development Model tidak hanya dimaknai sebagai proses pelaksanaan program pembangunan, tetapi lebih dari itu merupakan bentuk artikulasi dari kedaulatan komunitas dalam menentukan nasib dan arah transformasi sosial mereka. Dalam pendekatan ini, pelibatan masyarakat bukan sebatas formalitas administratif, melainkan sebuah praktik demokrasi partisipatoris yang menjadikan komunitas lokal sebagai pelaku utama dalam menjalankan program pembangunan yang telah dirancang secara kolaboratif. Dalam konteks pengembangan UMKM kreatif di Kabupaten Probolinggo, tahap implementasi menegaskan pentingnya pelaku usaha dan kelompok warga sebagai motor penggerak revitalisasi ekonomi lokal. Mereka tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai perancang, pengelola, dan penjaga keberlanjutan program. Hal ini sejalan dengan pandangan Puspitasari (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat sangat bergantung pada derajat kontrol dan otonomi komunitas dalam proses pelaksanaan program.

Observasi di beberapa desa di Kabupaten Probolinggo, seperti Banyuwang, Kraksaan Wetan, dan Sumberlele, menunjukkan bahwa keterlibatan langsung masyarakat dalam program pembangunan membuat kegiatan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Ketika warga diberi wewenang untuk mengelola program, hasilnya lebih tepat sasaran dan berbasis kearifan lokal.

Di Desa Banyuwang, misalnya, komunitas Batik Ganesha Probolinggo yang terdiri dari pelaku UMKM batik mengambil inisiatif mengelola sendiri pelatihan produksi, pemasaran digital, hingga distribusi. Tugas dibagi secara strategis: generasi muda mengurus media sosial dan promosi online, sementara pengrajin senior membimbing secara teknis. Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Probolinggo

(2023), model ini meningkatkan produksi batik hingga 38% dalam setahun dan memperluas pemasaran ke luar Jawa Timur.

Kepala Desa Banyuanyar menegaskan bahwa peran pemerintah desa dalam pembangunan lebih sebagai fasilitator yang mendukung inisiatif warga, bukan pengambil keputusan utama. Menurutnya, seluruh kegiatan seperti pelatihan membatik, produksi, dan pemasaran digital dijalankan langsung oleh masyarakat. Pemerintah desa hanya membantu menghubungkan sumber daya dan menyediakan ruang kolaborasi. Inisiatif dan pelaksanaan program berasal dari warga yang dinilai lebih paham kebutuhan lokal dan cara terbaik menjangkau pasar. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari pola pembangunan yang bersifat top-down ke arah model partisipatif berbasis komunitas.

Implementasi program secara langsung oleh komunitas juga mendorong proses pembelajaran sosial yang simultan. Misalnya, di Desa Kraksaan Wetan, kelompok pemuda desa bekerja sama dengan pelaku UMKM tape manis untuk mengembangkan aplikasi marketplace sederhana berbasis Android yang menampilkan katalog produk, harga, dan testimoni pelanggan. Aplikasi ini menjadi kanal distribusi baru yang mampu meningkatkan transaksi daring hingga 49% dalam waktu tiga bulan, menurut hasil monitoring Bappeda Kabupaten Probolinggo (2024). Proyek ini memperlihatkan terjadinya alih pengetahuan lintas generasi dan integrasi antara nilai budaya dengan inovasi teknologi, sebagaimana disarankan Chambers (1997) bahwa pengetahuan lokal seharusnya menjadi fondasi utama dalam merancang solusi pembangunan (Mohan 2024).

Lebih jauh, model implementasi berbasis komunitas juga memperkuat prinsip keberlanjutan sosial dalam pembangunan. Ketika masyarakat sendiri yang menjalankan program, ketergantungan terhadap aktor eksternal akan berkurang secara bertahap. Mereka lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi, baik dalam hal harga bahan baku, tren pasar digital, maupun gangguan eksternal lainnya. Hal ini sejalan dengan konsep self-reliance dalam teori pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Pretty (1995), yang menekankan pentingnya kemampuan komunitas dalam mempertahankan pembangunan secara mandiri dan adaptif (Rusdiyana et al. 2024). Di Desa Sumberlele, pelaku usaha tape manis memproduksi konten promosi secara berkala bersama pemuda desa, dan mendistribusikannya melalui grup Facebook UMKM Probolinggo Naik Kelas. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan jangkauan pasar, tetapi juga mempererat solidaritas sosial di tingkat lokal.

Keterlibatan penuh masyarakat dalam pelaksanaan program terlihat dari meningkatnya jumlah UMKM aktif, naiknya omzet bulanan, dan semakin banyak warga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi komunitas. Data lapangan menunjukkan bahwa setelah program dijalankan secara mandiri, jumlah UMKM aktif di Desa Banyuanyar naik dari 18 menjadi 29 unit, dengan kenaikan omzet rata-rata sebesar 51%. Ini menunjukkan bahwa pendekatan CBDM efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis partisipasi dan kekuatan masyarakat. Keberhasilan implementasi tidak hanya dilihat dari angka ekonomi, tetapi juga dari perubahan kesadaran, rasa memiliki, dan kemampuan sosial warga.

Dengan kata lain, pelaksanaan program dalam kerangka CBDM bukanlah proses teknis semata, tetapi ruang sosial dan budaya di mana masyarakat merumuskan identitas, nilai, dan masa depannya sendiri. Pengalaman di Kabupaten Probolinggo menunjukkan bahwa pembangunan akan lebih efektif dan berkelanjutan jika masyarakat diberi peran utama. Dari proses ini lahir bukan hanya produk ekonomi, tetapi juga kemandirian sosial berbasis kekuatan lokal.

Participatory Evaluation

Tahap evaluasi dalam kerangka Community-Based Development Model tidak dapat direduksi menjadi sekadar prosedur teknokratis yang bersifat eksternal dan instruksional. Sebaliknya, ia merupakan proses reflektif, kolaboratif, dan berakar pada partisipasi aktif komunitas itu sendiri. Evaluasi dalam pendekatan ini bertujuan untuk menilai seberapa besar perubahan substantif yang telah terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat sebagai hasil dari pelaksanaan program pemberdayaan, sembari mengidentifikasi titik-titik lemah atau hambatan yang perlu diperbaiki secara kolektif (Harting et al. 2022). Sejalan dengan gagasan Chambers (1997), evaluasi yang efektif dalam pembangunan partisipatif harus bersifat emik berangkat dari perspektif dan pengalaman warga sendiri bukan sekadar dari kacamata aktor luar atau lembaga donor (Mohan 2024).

Dalam upaya penguatan UMKM kreatif di Kabupaten Probolinggo, evaluasi partisipatif menjadi alat penting untuk menilai perkembangan kapasitas pelaku usaha lokal. Indikator utama yang digunakan meliputi peningkatan pendapatan, pemanfaatan pemasaran digital, keterlibatan anak muda, dan penguatan unsur budaya dalam produk. Hasil studi Bappeda dan Universitas Nurul Jadid (2024) menunjukkan bahwa dari 135 UMKM binaan di 7 kecamatan, sekitar 61% mengalami kenaikan omzet rata-rata 38% setelah mengikuti program digitalisasi dan branding berbasis kearifan lokal. Meski begitu, 43% pelaku usaha masih kesulitan dalam

visualisasi produk dan pemasaran online, menunjukkan perlunya pelatihan lanjutan di bidang konten digital.

Evaluasi dalam pendekatan CBDM dilakukan secara partisipatif melalui diskusi kelompok, survei komunitas, dan metode bercerita (storytelling) untuk menggali pengalaman bersama. Di Desa Sumberlele, UMKM tape manis dan batik rutin menggelar forum evaluasi setiap tiga bulan di balai desa, melibatkan koperasi, pemuda digital, dan tokoh masyarakat. Dalam forum itu, mereka berbagi capaian, kendala, dan rencana pengembangan program berikutnya. Salah satu pelaku tape, Ibu Nurhayati (47), menyampaikan bahwa pelatihan desain kemasan membantu meningkatkan minat pembeli, namun ia masih membutuhkan dukungan teknis untuk menghasilkan foto produk yang menarik agar bisa bersaing di marketplace nasional.

Model evaluasi semacam ini tidak hanya menghasilkan data kuantitatif, tetapi juga membangun atmosfer dialogis yang memperkuat trust, akuntabilitas sosial, dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti (evidence-based decision making). Seperti ditegaskan oleh Cornwall dan Jewkes (1995), evaluasi partisipatif memiliki keunggulan dalam mengintegrasikan dimensi subjektif komunitas ke dalam proses pembangunan, sehingga mendorong keberlanjutan program yang lebih kontekstual dan adaptif. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa dengan adanya forum evaluatif, masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap keberhasilan kolektif dan kebutuhan akan inovasi, bukan semata-mata menunggu program eksternal (Niner et al. 2023).

Evaluasi dalam pendekatan CBDM mendorong terciptanya proses belajar bersama (collective learning), yaitu pembelajaran sosial yang melibatkan semua elemen masyarakat secara setara. Proses ini tidak hanya menjadi refleksi individu, tetapi berkembang menjadi kesadaran kolektif atas keberhasilan dan tantangan yang dihadapi bersama. Di Desa Kraksaan Wetan, misalnya, hasil evaluasi akhir tahun 2024 mendorong kelompok pemuda pengelola katalog digital UMKM untuk mengadakan pelatihan visual produk secara peer-to-peer, setelah forum warga menilai visualisasi produk lokal masih kurang menarik. Inisiatif ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu menciptakan solusi dari dalam, memperkuat daya saing, dan menunjukkan kematangan sosial yang terus tumbuh.

Dengan demikian, evaluasi dalam CBDM bukanlah tahap akhir pembangunan, tetapi awal dari proses pembelajaran yang berkelanjutan. Evaluasi partisipatif tidak hanya membantu memperbaiki program, tetapi juga memastikan bahwa penguatan ekonomi lokal berjalan inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan budaya setempat.

Evaluasi bukan sekadar alat pengawasan, melainkan ruang refleksi bersama yang menumbuhkan cita-cita pembangunan dari dalam komunitas itu sendiri.

Independence

Tahap kemandirian (independence) merupakan fase puncak dalam pendekatan Community-Based Development Model, di mana komunitas lokal tidak hanya berhasil menyerap manfaat program pembangunan, tetapi telah mampu mengelola, mempertahankan, dan memperluas hasil-hasil pembangunan tersebut secara otonom. Dalam konteks revitalisasi UMKM berbasis kearifan lokal di Kabupaten Probolinggo, kemandirian komunitas ditandai oleh kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan siklus bisnis yang berkelanjutan meliputi produksi, distribusi, promosi, hingga inovasi produk tanpa bergantung secara struktural pada intervensi pihak eksternal. Hal ini sesuai dengan pendapat Sen (1999) dalam *Development as Freedom*, yang menekankan bahwa pembangunan sejati adalah pelepasan dari ketergantungan dan pencapaian kapasitas individu maupun kolektif untuk mengambil keputusan hidup secara bermartabat dan mandiri (Yahya et al. 2025).

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sejumlah komunitas UMKM di Probolinggo telah mulai menunjukkan ciri-ciri kemandirian tersebut. Di Desa Banyuanyar, misalnya, kelompok pengrajin batik lokal tidak hanya mampu memenuhi pesanan rutin dari pasar regional, tetapi juga telah menjalin kerja sama dengan marketplace nasional dan mengelola konten digital secara konsisten. Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Probolinggo (2024) menyebutkan bahwa omzet kolektif kelompok ini meningkat sebesar 57% dalam satu tahun terakhir, sementara 73% anggotanya sudah tidak lagi mengandalkan pelatihan atau subsidi dari pemerintah daerah. Selain itu, koperasi desa yang menaungi mereka berhasil membentuk unit simpan pinjam berbasis komunitas yang digunakan sebagai sumber permodalan mandiri sebuah indikator kuat dari keberhasilan pembentukan sistem ekonomi alternatif berbasis lokal.

Kemandirian komunitas juga membuka ruang luas bagi praktik replikasi program ke wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial dan budaya serupa. Namun, replikasi dalam konteks CBDM bukanlah semata-mata penggandaan teknis program, melainkan proses transfer nilai-nilai fundamental seperti partisipasi, keberdayaan, dan kedaulatan komunitas dalam pembangunan. Untuk itu, dibutuhkan dokumentasi praktik baik (best practices), pelibatan mentor dari komunitas yang telah berhasil, serta pembentukan jaringan pembelajaran antar desa atau kecamatan. Seperti yang dicatat oleh Ledjab et al. (2025) pembangunan partisipatif akan berkelanjutan bila proses replikasi melibatkan pendekatan

horizontal berbasis jaringan sosial lokal. Di Kecamatan Kraksaan, pelaku UMKM olahan tape manis dari Desa Sumberlele telah beberapa kali diundang menjadi fasilitator di desa tetangga untuk berbagi pengalaman tentang pengembangan katalog digital dan manajemen pemasaran daring. Proses ini bukan hanya membangun solidaritas ekonomi lintas wilayah, tetapi juga memperluas ekosistem kolaboratif antar komunitas yang saling mendukung.

Replikasi program yang didasarkan pada semangat kemandirian dan nilai-nilai lokal telah mendorong lahirnya struktur ekonomi alternatif berbasis budaya komunitas. Model ini terbukti lebih kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi global yang cenderung seragam dan merugikan. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan berperan aktif sebagai penggerak perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Studi di Kabupaten Probolinggo menunjukkan bahwa ketika UMKM diberi ruang untuk berkembang sesuai dengan nilai budaya lokal, dampaknya tidak hanya terlihat dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari penguatan identitas budaya, kebanggaan kolektif, dan kesadaran atas potensi komunitas sendiri.

Karena itu, tahap kemandirian dalam pendekatan CBDM mencerminkan bentuk pembangunan yang benar-benar transformatif. UMKM lokal kini dipandang sebagai kekuatan strategis untuk membangun ekonomi yang inklusif, tangguh, dan sesuai dengan jati diri budaya masyarakat. CBDM bukan hanya menjawab tantangan ekonomi, tetapi juga memperkuat kembali ikatan sosial dalam menghadapi era digital dan perubahan global. Kemandirian di sini bukan akhir dari proses, tetapi langkah awal menuju pembangunan berkelanjutan yang digerakkan oleh kekuatan masyarakat itu sendiri.

KESIMPULAN

Dalam mengembangkan ekonomi komunitas di Kabupaten Probolinggo, pendekatan Community-Based Development Model menjadi instrumen strategis yang mampu menggugah potensi lokal serta membentuk ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini menempatkan warga sebagai subjek aktif pembangunan, dimulai dari pemetaan potensi hingga keterlibatan dalam proses evaluasi. Proses ini mencerminkan tahapan reflektif yang paralel dengan langkah-langkah dalam pembelajaran kontekstual, di mana setiap warga tidak hanya diberdayakan secara ekonomi, tetapi juga secara sosial melalui praktik gotong royong, penguatan otonomi lokal, dan tumbuhnya rasa kepemilikan terhadap proses pembangunan. Temuan dari wilayah Banyuwangi, Kraksaan Wetan, dan Sumberlele menjadi bukti konkret bahwa pembangunan yang tumbuh dari bawah, dengan

menghidupkan kembali nilai-nilai budaya lokal, lebih adaptif dan berkelanjutan dibandingkan pendekatan yang bersifat instruktif dari luar.

CBDM dalam konteks ini juga dapat dianalogikan sebagai suatu model pembelajaran sosial, yang mendorong pengambilan keputusan kolektif berdasarkan pengalaman dan kearifan lokal. Dengan menggunakan kerangka evaluasi yang partisipatif dan reflektif, studi ini memberikan kontribusi penting bagi literatur pembangunan partisipatif, khususnya dalam upaya merevitalisasi ekonomi desa berbasis budaya lokal. Penelitian ini memperlihatkan adanya jembatan konkret antara konsep teoritis dan praktik lapangan, dengan menyajikan data empiris yang kaya serta pendekatan kontekstual yang inklusif. Meski demikian, keterbatasan ruang lingkup geografis dan belum tergalinya dimensi gender dan usia secara mendalam menjadi catatan penting bagi penelitian lanjutan. Oleh karena itu, diperlukan eksplorasi lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif dan perluasan wilayah studi agar model pembangunan berbasis komunitas ini dapat diformulasikan menjadi kebijakan publik yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Acemoglu, Daron. 2025. "Nobel Lecture: Institutions, Technology, and Prosperity." *American Economic Review* 115(6):1709–48.
- Achmad, Willya. 2023. "Pemetaan Sosial Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Dinamika Program Pemberdayaan Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(4):4367–80.
- Al Ahsani, Nasirudin. 2024. "Konsep Shiddiq Dan Religiusitas Dalam Manajemen Pengelolaan Pertanian Kebun Kopi Segaran Di Kecamatan Tiris, Probolinggo." *Maddah: Journal of Advanced Da'wah Management Research* 3(2):113–26.
- Aini, Winda Nurul. 2024. "Analisis Strategi Komoditas Agribisnis Untuk Mendukung Pendapatan Petani Wortel Di Desa Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo."
- Čajka, Adam, and Josef Novotný. 2022. "Let Us Expand This Western Project by Admitting Diversity and Enhancing Rigor: A Systematic Review of Empirical Research on Alternative Economies." *Ecological Economics* 196:107416.
- Cantoni, Davide, and Noam Yuchtman. 2025. "Acemoglu, Johnson, and Robinson: The Identification of Historically Contingent Causal Effects." *Scandinavian Journal of Economics*.
- Cirone, Alexandra, and Thomas B. Pepinsky. 2022. "Historical Persistence." *Annual*

Review of Political Science 25(1):241–59.

- Daulay, Sholihatul Hamidah et al. 2021. "Online Learning Problems in the Covid-19 Pandemic for English Education Students." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 13(3):2373–80.
- Emilia, Herlin Putri, and Timbul Dompok. 2024. "Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik* 2(2):824–35.
- Frankema, Ewout. 2025. "From the Great Divergence to South–South Divergence: New Comparative Horizons in Global Economic History." *Journal of Economic Surveys* 39(2):517–45.
- Harting, Janneke et al. 2022. "Participatory Research in Health Promotion: A Critical Review and Illustration of Rationales." *Health Promotion International* 37(Supplement_2):ii7–20.
- Hibbs, Leah. 2022. "'I Could Do That!'–The Role of a Women's Non-Governmental Organisation in Increasing Women's Psychological Empowerment and Civic Participation in Wales." P. 102557 in *Women's Studies International Forum*. Vol. 90. Elsevier.
- Leach, Melissa et al. 2025. "Community-Based Sustainable Development: Consensus or Conflict?" *IDS Bulletin* 56(1A).
- Ledjab, Matias Muhi et al. 2025. "Efektivitas Program Pemberdayaan Petani Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Torok Golo, Kecamatan Rana Mese Manggarai Timur." *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 2(2):130–40.
- Mohan, Giles. 2024. "Participatory Development." Pp. 484–89 in *The companion to development studies*. Routledge.
- Muljono, P. et al. 2022. "The Effectiveness of Village-Campus Program in Bogor, West Java, Indonesia." *Journal of Hunan University Natural Sciences* 49(4).
- Mustakim, Alan, and Jamaluddin Hos. 2025. "Kajian Literatur Strategi Pemberdayaan Komunitas Pengelola Wisata Dalam Mendukung Keberhasilan Desa Wisata." *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy* 5(1):53–64.
- Myers, Jamie et al. 2024. "Rigour, Timeliness, and Trade-Offs in Research: Experience from India's Swachh Bharat Mission." *Development in Practice* 34(3):311–24.
- Nchake, Mamello A., and Mohammed Shuaibu. 2022. "Investment in ICT Infrastructure and Inclusive Growth in Africa." *Scientific African* 17:e01293.
- Niner, Sara et al. 2023. "Evaluating the Extent of Participation of People Living with

- Dementia in Research." *International Journal of Qualitative Methods* 22:16094069231211248.
- Nurmaulidia, Kayla Revina et al. 2024. "Analisis Perkembangan Ekonomi Syariah Di Asia Tenggara Pasca Berdirinya BRICS." *Journal of Economics and Business* 2(2):238–46.
- Ofori, Isaac K., and Simplicie A. Asongu. 2021. "ICT Diffusion, Foreign Direct Investment and Inclusive Growth in Sub-Saharan Africa." *Telematics and Informatics* 65:101718.
- Park, Albert, and Sangui Wang. 2010. "Community-Based Development and Poverty Alleviation: An Evaluation of China's Poor Village Investment Program." *Journal of Public Economics* 94(9–10):790–99.
- Platteau, Jean-Philippe, and Frederic Gaspart. 2003. "Disciplining Local Leaders in Community-Based Development." *Centre for Research on the Economics of Development* [Http://Www. Worldbank. Org/Research/Wdr/WDR2004/Papers/Platteau. Pdf](http://www.worldbank.org/Research/Wdr/WDR2004/Papers/Platteau.Pdf).
- Puspitasari, Distya. 2024. "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Terkait Perekonomian Di Desa Mororejo Kabupaten Kendal Dengan Perspektif Modal Sosial." *SOSEARCH: Social Science Educational Research* 4(2):22–29.
- Putra, Arga Pratama et al. 2025. "Strategi Pemberdayaan Petani Kopi Sebagai Upaya Peningkatan Produksi Kopi DiKecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 10(1):21–30.
- Qomariah, Rosita Nurul et al. 2025. "Peran Perputaran Piutang Pada Perkembangan Sisa Hasil Usaha (Shu) Di Koperasi Unit Desa (Kud) Argopuro Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Tahun Buku 2021-2023." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 53–62.
- Riantini, Maya, and Rudi Situmeang. 2022. "Pemberdayaan Perempuan Pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Untuk Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Petani Di Desa Enggalrejo, Kabupaten Pringsewu." *Open Community Service Journal* 1(2):44–48.
- Rusdiyana, Eksa et al. 2024. "A Bibliometric Review of Sustainable Agriculture in Rural Development." *West Science Interdisciplinary Studies* 2(03):630–37.
- Satriani, Satriani et al. 2024. "Peranan Digitalisasi Dalam Mendukung Pemberdayaan Ekonomi Inklusif: Studi Kasus Pada UMKM Kuliner Di Makassar." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1(10):7644–50.
- Yahya, Azka Alycia et al. 2025. "Kesenjangan Gender Dalam Dunia Kerja Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 9(3):61–70.

Lampiran-Lampiran

Sumber Data

No	Nama Instansi / Universitas	Keterangan Sumber / Peran	Tautan Resmi
1	Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur	Data digitalisasi UMKM dan pendapatan meningkat 35%	bps.jatim.go.id
2	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Probolinggo	Pelatihan batik, digitalisasi, dan pemetaan partisipatif UMKM	simadu.probolinggo.go.id
3	Bappeda Kabupaten Probolinggo	Monitoring omzet, evaluasi partisipatif UMKM, pendampingan desa	bappeda.probolinggo.go.id
4	Kementerian Koperasi dan UKM RI	Pendanaan Program "UMKM Naik Kelas" & fasilitasi PIRT/sertifikasi	kemenkopukm.go.id
5	Balai Besar Kerajinan dan Batik - Kementerian Perindustrian RI	Pelatihan dan pengembangan motif lokal batik Probolinggo	bbkb.kemenperin.go.id
6	OJK & BPS Pusat	Data SNLIK 2024: literasi digital & inklusi keuangan pelaku UMKM	ojk.go.id
7	Universitas Nurul Jadid	Studi evaluasi partisipatif UMKM binaan di 7 kecamatan	unuja.ac.id
8	Universitas Panca Marga	Survei lapangan: UMKM belum memiliki NIB dan literasi keuangan rendah	upm.ac.id
9	AINI (Akademi Industri Niaga) Indonesia	Riset sertifikasi halal & pengemasan produk Kraksaan	[Belum tersedia situs aktif]
10	Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) – PDPM	Survei potensi lokal Probolinggo dan kajian pemetaan partisipatif	pdpm.its.ac.id

Hasil Wawancara

No	Informan	Isi Wawancara Utama	Desa & Kecamatan	Tanggal
1	Suharyono, Kepala Desa Sumberlele	<i>"Musyawarah desa selalu dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua kelompok, termasuk perempuan, pemuda, dan tokoh adat."</i>	Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan	11 Juni 2025
2	Supriyanto, Kepala Desa Jorongon	<i>"Seluruh kegiatan seperti pelatihan membuat, produksi, dan pemasaran digital dijalankan langsung oleh masyarakat. Pemerintah desa hanya membantu menghubungkan sumber daya."</i>	Desa Jorongon, Kecamatan Leces	30 Mei 2025
3	Zamroni, Kepala Desa Banyuanyar Tengah	<i>"Kami selalu melibatkan semua unsur masyarakat dalam setiap perubahan anggaran, termasuk perangkat, RT/RW, PKK, tokoh agama, dan pemuda."</i>	Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar	23 Mei 2024
4	Ibu Nurhayati, Pelaku UMKM Tape Manis	<i>"Pelatihan desain kemasan membantu meningkatkan minat pembeli, namun saya masih membutuhkan dukungan teknis untuk menghasilkan foto produk yang menarik."</i>	Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan	11 Juni 2024